

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN  
DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA MODAL  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**Ayu Prastiwi<sup>1\*</sup>, Siti Nurlaela<sup>2</sup>, Yuli Chomsatu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No.10 Surakarta

\*Email: ayuprastiwi.tiwo@gmail.com

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik dan juga sebagai bahan pertimbangan Pemkot Surakarta dalam mengalokasikan belanja modal. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, regresi linear berganda dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.*

**Kata kunci:** Modal, Pegawai, Pendapatan dan Perimbangan

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemda mempunyai kewenangan dan hak yang luas untuk menggunakan sumber-sumber perekonomian daerah yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, disini lebih diarahkan pada Belanja Modal. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang juga merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Selain itu perbaikan infrastruktur mampu mengundang ketertarikan investor untuk berinventasi dan membuka usaha di daerah.

Pemerintah Kota Surakarta diharapkan untuk terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur di kawasan Kota Surakarta. Untuk membiayai kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur tersebut tentunya juga harus diikuti dengan penganggaran belanja modal yang lebih besar. Sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD didapatkan dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain PAD, sumber pendapatan lainnya yang digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja pegawai termasuk didalam belanja operasi dan merupakan salah satu komponen belanja Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 – 2014, selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi (belanja operasi disini lebih didominasi oleh belanja pegawai) dari pada belanja modal. Masalah mengenai jumlah dan formasi PNS merupakan pemicu membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, meskipun jumlah dan formasi ideal bagi setiap kantor pemerintahan telah ditentukan melalui peraturan, namun kondisi riilnya masih jauh dari kondisi ideal (Jiwatami, 2013). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diambil judul penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal ?
2. Apakah Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) berpengaruh terhadap belanja modal ?
3. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap belanja modal ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Disamping itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) terhadap belanja modal
3. Mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap belanja modal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal
2. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kota Surakarta dalam mengalokasikan belanja modal dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki pemerintah kota Surakarta, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

## 1.5 Landasan Teori

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah (Abdullah & Febriansyah, 2015). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah (Kusnandar dan Siswantoro 2012).

Tujuan dasar transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah sebagai sarana vertical balance (keseimbangan antar pemerintah pusat dengan daerah). Khusus Dana Alokasi Umum selain sebagai sarana vertical balance, juga merupakan sarana horizontal balance (keseimbangan antara tiap-tiap pemerintah daerah), yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke daerah. Dana Alokasi Umum sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima suatu daerah, berarti daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dalam

memenuhi belanjanya, yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Jiwatami 2013).

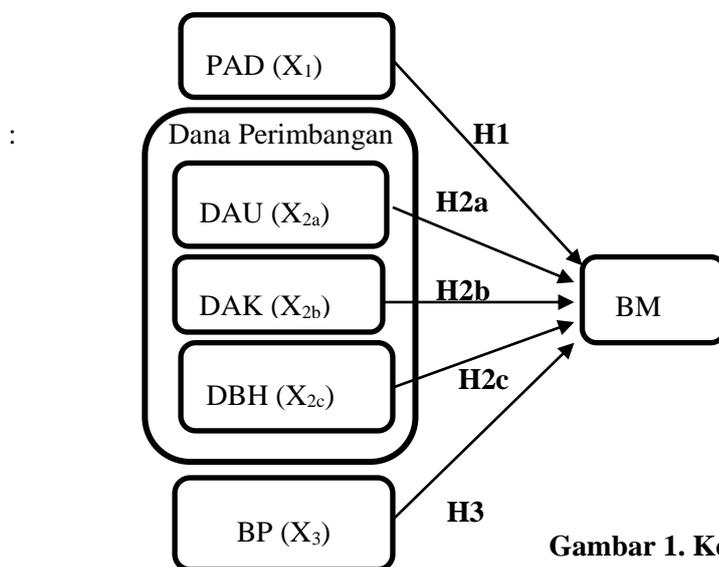
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor pendukung dari Belanja Modal. Adanya Dana Bagi Hasil ini biaya pembangunan di daerah dapat bertambah (Sholikhah dan Wahyudin 2014). Secara umum, sifat Dana Bagi Hasil sama seperti Dana Alokasi Umum yaitu block grant. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penentuan alokasi belanja dari Dana Bagi Hasil. Walaupun terdapat pengecualian untuk Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi yang sebagian dananya (0,2% dari tiap kab/kota dan 0,1% dari tiap provinsi) ditujukan untuk anggaran pendidikan dasar. Selain itu Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi, sebesar 40% dianggarkan untuk rehabilitasi hutan/lahan (Jiwatami 2013).

Pengalokasian belanja pegawai yang besar dalam APBD tentunya juga akan berpengaruh pada pengalokasian belanja modal. Berdasarkan penelitian (Jiwatami 2013), dapat dikatakan bahwa kenaikan realisasi belanja pegawai akan memicu penurunan pada realisasi dari belanja modal. Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kesenjangan dalam penganggaran belanja tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik.

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**Hipotesis**

Dari landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan hipotesisnya adalah: Pertama, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kedua a, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kedua b, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kedua c, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Ketiga, Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Sedangkan variabel independennya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan (terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil) dan belanja

pegawai. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008 – 2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kota Surakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008 – 2014 yaitu berupa data realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja pegawai dan belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan populasi penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. Adapun metode dan langkah-langkah untuk analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
  - a. Model Regresi  
Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :
 
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_{2a} X_{2a} + \beta_{2b} X_{2b} + \beta_{2c} X_{2c} + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$
 Keterangan:  
 Y = belanja modal  
 $\alpha$  = konstanta  
 $\beta_1$  = koefisien regresi pendapatan asli daerah  
 $\beta_{2a}$  = koefisien regresi dana alokasi umum  
 $\beta_{2b}$  = koefisien regresi dana alokasi khusus  
 $\beta_{2c}$  = koefisien regresi dana bagi hasil  
 $\beta_3$  = koefisien regresi belanja pegawai  
 $X_1$  = variabel pendapatan asli daerah  
 $X_{2a}$  = variabel dana alokasi umum  
 $X_{2b}$  = variabel dana alokasi khusus  
 $X_{2c}$  = variabel dana bagi hasil  
 $X_3$  = variabel belanja pegawai  
 variabel e = variabel pengganggu
  - b. Uji Statistik t  
Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%*
  - c. Uji Statistik F  
Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%*
  - d. Koefisien determinasi ( $R^2$ )  
Koefisien Determinasi (R Square) dapat diperoleh dari koefisien korelasi dikuadratkan. Untuk regresi berganda, koefisien determinasi diperoleh dari koefisien korelasi multipel (bergandanya) dikuadratkan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	Minimum	Maximum	Mean
PAD	102,99	335,66	195,7900
DAU	420,91	710,80	542,1986
DAK	28,97	43,85	34,2157
DBH	42,64	86,07	65,4471
BP	368,45	832,81	606,4529
BM	79,76	286,49	182,8343

Hasil Statistik Deskriptif ditunjukkan pada tabel 1 diatas. Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat nilai minimum, maksimum dan rata-rata untuk masing-masing variabel.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian Normalitas menunjukkan bahwa *p-value* dari *unstandardized residual* ternyata lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,939 > 0,05$ ), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data**

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	p-Value	Sig	Status
<i>Unstandardized residual</i>	0,532	0,939	$p > 0,05$	Normal

Hasil pengujian Multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki *tolerance* lebih dari 0,1 ( $> 0,1$ ) dan semua variabel bebas memiliki nilai *VIF* kurang dari 10 (Ghozali, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,130	7,175	Bebas multikolinieritas
Dana Alokasi Umum	0,139	6,423	Bebas multikolinieritas
Dana Alokasi Khusus	0,110	9,286	Bebas multikolinieritas
Dana Bagi Hasil	0,146	5,853	Bebas multikolinieritas
Belanja Pegawai	0,159	4,028	Bebas multikolinieritas

Hasil pengujian Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai D-W berada di daerah bebas autokorelasi, yaitu  $d_u < D-W < 4-d_u$  yaitu  $0,56 < 1,534 < 1,79$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada gangguan autokorelasi dalam model regresi.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

D-W	$d_L$	$d_U$	$4-d_U$	Kriteria	Keterangan
1,534	0,56	2,21	1,79	$0,56 < 1,534 < 1,79$	Bebas autokorelasi

Hasil pengujian Heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai  $p > 0,05$  atau tidak signifikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini (Ghozali, 2006)

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}^*$	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,348	12,706	0,787	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,220	12,706	0,862	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Alokasi Khusus	0,395	12,706	0,760	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Bagi Hasil	0,299	12,706	0,815	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja Pegawai	-0,566	12,706	0,672	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Keterangan: \*)  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dengan  $df = 7-5$

### 3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

#### Model Regresi

Dari hasil analisis regresi di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$BM = -148,940 + 0,346 (PAD) + 1,016 (DAU) + 1,903 (DAK) - 0,562 (DBH) - 0,281 (BP) + e \quad (1)$$

Persamaan menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai. Nilai konstanta sebesar -148,940 menyatakan jika tidak ada peningkatan PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai, maka skor alokasi belanja modal berkurang sebesar 148,940 satuan.

### Uji Hipotesis

Hasil uji t dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji t**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}^*$	P-value	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	13,876	12,706	0,046	H <sub>1</sub> diterima
Dana Alokasi Umum	55,070	12,706	0,012	H <sub>2a</sub> diterima
Dana Alokasi Khusus	9,860	12,706	0,064	H <sub>2b</sub> ditolak
Dana Bagi Hasil	-7,067	12,706	0,089	H <sub>2c</sub> ditolak
Belanja Pegawai	-30,139	12,706	0,021	H <sub>3</sub> diterima

Keterangan: \*) =  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dengan  $df= 7-5$

Hipotesis 1 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun *output* hasil uji t untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai  $t_{hitung} = 13,876$  dengan nilai  $p=0,046$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% adalah = 12,706. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $13,876 > 12,706$ ) dengan  $p>0,05$ , maka hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) dinyatakan diterima.

Hipotesis 2a menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun *output* hasil uji t untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai  $t_{hitung} = 55,070$  dengan nilai  $p=0,012$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% adalah = 12,706. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $55,070 > 12,706$ ) dengan  $p<0,05$ , maka hipotesis kedua a (H<sub>2a</sub>) dinyatakan diterima.

Hipotesis 2b menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun *output* hasil uji t untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai  $t_{hitung} = 9,860$  dengan nilai  $p=0,064$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% adalah = 12,706. Dikarenakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $9,860 < 12,706$ ) dengan  $p>0,05$ , maka hipotesis kedua b (H<sub>2b</sub>) dinyatakan ditolak.

Hipotesis 2c menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun *output* hasil uji t untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai  $t_{hitung} = -7,067$  dengan nilai  $p=0,089$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% adalah = 12,706. Dikarenakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $7,067 < 12,706$ ) dengan  $p>0,05$ , maka hipotesis kedua c (H<sub>2c</sub>) dinyatakan ditolak. Kesimpulan hasil uji hipotesis: DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hipotesis 3 menyatakan belanja pegawai berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun *output* hasil uji t untuk variabel Belanja Pegawai (BP) memiliki nilai  $t_{hitung} = -30,139$  dengan nilai  $p=0,021$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% adalah = 12,706. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $30,139 > 12,706$ ) dengan  $p<0,05$ , maka hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) dinyatakan diterima. Nilai negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif.

### Uji Statistik F

Hasil pengujian nilai F dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji F**

Variabel	$F_{hitung}$	$F_{tabel}^*$	P-value	Keterangan
PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai terhadap belanja modal	3190,759	230	0,000	H <sub>0</sub> ditolak

Keterangan: \*) =  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dengan  $df= 5;1$

Dari hasil pengolahan data diperoleh  $F_{hitung} = 3190,759$ , sedangkan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dengan  $df (5;1)$  adalah sebesar 230. Dikarenakan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $3190,759 > 230$ ), artinya model regresi tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai terhadap belanja modal dinyatakan fit atau cocok. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal daerah.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil pengujian Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8. Hasil Koefien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,997 <sup>a</sup>	,984	,962

Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,962, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik (*goodness of fit*). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 96,2% variasi dari alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Pegawai. Sedangkan sekitar 3,8% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap belanja modal. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan belanja pegawai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008 – 2014 yaitu berupa data realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja pegawai dan belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan populasi penelitian. Alat analisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014. Artinya tinggi rendahnya PAD berimplikasi pada besarnya alokasi belanja modal daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014. Artinya pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal; (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014. Artinya jumlah DAK yang diterima oleh pemerintah daerah terlalu kecil, sehingga tidak memiliki peran signifikan dalam peningkatan belanja modal. Hal ini berarti DAK bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal pemerintah daerah; (4) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014. Artinya DBH yang diterima oleh pemerintah daerah memang tidak dialokasikan untuk belanja modal; (5) Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014. Artinya jumlah pegawai pemerintah daerah yang besar merupakan pemicu membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, sehingga dana yang diperoleh lebih banyak untuk belanja pegawai. Hal ini berdampak pada menurunnya alokasi belanja modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Febriansyah. (2015, September). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Darmayasa, I. N., & Suandi, I. K. (2014, September). Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1), 53-64.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Jiwatami, S. (2013, September). Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012, September). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Nasucha, Y., Rohmadi, M., & Wahyudi, A. B. (2014). *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. MEDIA PERKASA: Yogyakarta.

- 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Priyatno, D. (2008). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. ANDI: Yogyakarta.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal* .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Verawaty, Merina, C. I., & Sari, M. (2015, September). Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII* .
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal 2* .